

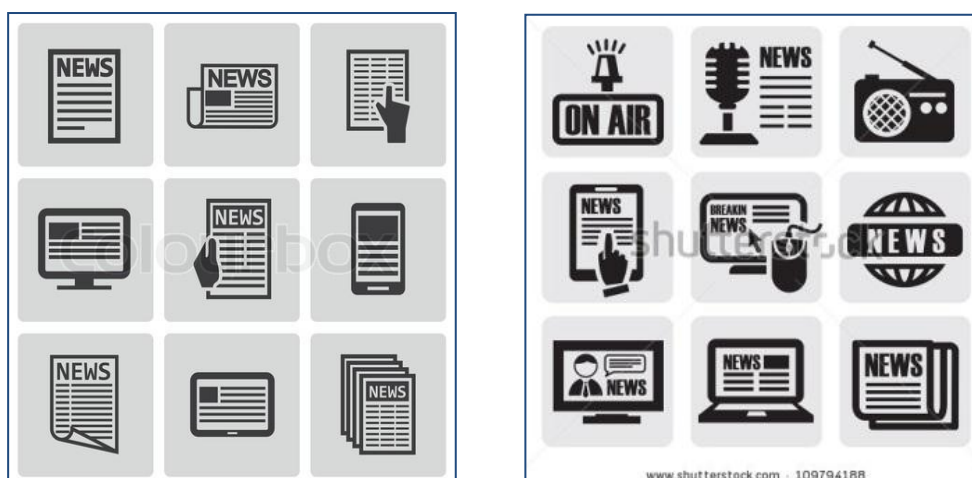


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Kamis, 11 September 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. PEMERINTAHAN BARU AKAN OPTIMALKAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR DARI SWASTA (*Media Online Indonesia Finance Today*)

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.if.co.id

DECIDE NOW

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499

idea
Bloomberg TV INDONESIA
Bloomberg Businessweek

INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Kamis, 11 September 2014

Halaman 6, Kolom 1-5

Pemerintah Baru akan Optimalkan Pendanaan Infrastruktur dari Swasta

Untuk anggaran infrastruktur, pemerintah baru akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk menarik investasi di sektor infrastruktur.

Dusep Malik, Nurul Fitriany

JAKARTA – Tim Transisi memastikan tidak akan menggunakan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk tambahan anggaran infrastruktur. Pemerintah akan lebih mengoptimalkan pencarian dana swasta.

Hasto Kristianto, Deputi Tim Transisi, mengatakan dana SAL bukan digunakan untuk anggaran infrastruktur tetapi untuk anggaran awal tahun pemerintah, karena penerimaan pajak belum masuk. Untuk anggaran infrastruktur, pemerintah baru akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk menarik investasi di sektor infrastruktur. "Kita ada upaya-upaya (pencarian anggaran infrastruktur) dengan partisipasi swasta. (SAL) belum akan digunakan ke situ," terangnya.

Pihaknya optimistis investor memiliki kepercayaan dengan pemerintah baru sehingga investasi akan masuk. Selain itu, saat ini dasar-dasar perbaikan investasi sudah mulai dilakukan pemerintah seperti menyatakan kementerian teknis agar administrasi lebih mudah. "Relokasi subsidi juga bisa dijadikan sumber pendanaan infrastruktur, tetapi sebelum dilakukan relokasi banyak hal yang dijanjikan, tentu saja mereka yang di kategorikan miskin mendapat prioritas sejak awal," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, dalam pembahasan APBN



Program Infrastruktur Jokowi-JK

- I Infrastruktur dasar strategis
 - 1 Perbaikan jalur selatan Jawa
 - 2 Jalur pengembangan ferry
 - 3 Pemertanian jalur strategis tol trans Jawa
 - 4 Perbaikan kualitas jalan lintas timur
 - 5 Trans Kalimantan dan Sulawesi
- II Bidang Konektivitas Laut
 - 1 Tol laut (revitalisasi pelabuhan dan pembangunan kapal)
- III Bidang Kelistrikan
 - 1 Investasi transmisi dan pembangkit
- IV Teknologi Informasi Komunikasi
 - 1 Menyediakan bandwidth 1 Gb per bulan/kapita
 - 2 Layanan e-government
 - 3 Pembangunan pusat industri kreatif nasional berbasis IT

Sumber: Tim Transisi



Pemerintah baru akan mendorong pembangunan infrastruktur.

2015 akan berusaha untuk memperbesar ruang fiskal lewat fraksi-fraksi di DPR. Namun jika hal ini tidak optimal, pemerintah baru akan mempercepat melakukan perubahan APBN 2015.

Kemungkinan percepatan APBN akan dilakukan pada November atau Desember. "Kita tidak ingin mengulang-ngulang, tapi jika tidak optimal akan kita lakukan. Perubahannya boleh dilakukan pada 2014, bisa saja November, kalau Desember sudah persiapan libur. Pengajuan (APBN-P) dilakukan pada DPR baru," tuturnya.

Hasto berharap defisit APBN 2015 lebih kecil, sehingga dapat menekan pembiayaan yang tidak jelas. Dari sisi, pendapatan ada upaya yang cukup baik dilakukan pemerintah saat ini, seperti melakukan negosiasi dengan per-

usahaan pertambangan seperti, PT Freeport Indonesia sehingga ada peningkatan penerimaan negara bukan pajak. "Pemerintah saat ini juga meletakkan dasar-dasar penghematan," jelasnya.

Deby Supriadi Priyatna, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan pemerintah akan mengajukan skema campuran untuk membiayai proyek infrastruktur yaitu skema pembiayaan 100% (target investasi dilaksanakan keseluruhan) untuk infrastruktur dasar dan 75% untuk pembiayaan non infrastruktur dasar.

Menurut dia, dua model skenario pembiayaan tersebut akan mempengaruhi capaian tersedianya infrastruktur pada 2025 atau menyesuaikan dengan target Mas-

terplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Kita akan ajukan campuran ke pemerintah baru, 100% dan 75%. Tapi untuk pembiayaan infrastruktur dasar kita ajukan 75%, Artinya dari pembiayaan tersebut target infrastruktur akan tercapai pada 2025 sesuai dengan MP3EI dan RPJPN," ujarnya, kemarin.

Dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah telah menyiapkan tiga skenario pendanaan infrastruktur. Skenario tersebut menentukan kapan pembangunan bisa tercapai secara pe-

nah dan menentukan capai dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-8%.

Skenario tersebut terdiri dari skenario 100% atau penuh yang membutuhkan dana total mencapai Rp 7.263 triliun dengan sasaran tercapai 2020, kemudian skenario 75% atau parsial butuh Rp 5.470 triliun dengan capaian sasaran 100% pada 2025 dan skenario 50% atau dasar butuh Rp 3.937 triliun dengan capaian sasaran 2030.

Sebelumnya, Akbar Fajsal, Deputi Tim Transisi Bidang Infrastruktur, mengatakan ada empat bidang infrastruktur yang akan dikerjakan pemerintah baru. Bidang tersebut adalah infrastruktur dasar strategis, konektivitas laut, kelistrikan/energi, dan teknologi informasi komunikasi. Seluruh bidang tersebut akan dikerjakan jangka pendek, menengah hingga panjang.

Pembiayaan

Sementara itu, Chatib Basri, Menteri Keuangan, mengatakan untuk mengatasi masalah pembiayaan tersebut pemerintah baru disulitkan untuk fokus mengisir sumber pendanaan dari dalam negeri dan menekan defisit anggaran lebih kecil lagi, terlebih pada tahun depan ada pengaruh isu pembalikan arus modal asing.

Dengan fokus terhadap pendanaan dalam negeri maka anggaran yang mengandalkan pembiayaan dari luar akan lebih kecil dan tidak berdampak besar apabila terjadi pembalikan modal ke luar negeri.

Selain itu, fokus menurunkan defisit anggaran menjadi lebih kecil, pemerintah juga perlu menaikkan harga BBM subsidi untuk mengalihkan anggaran untuk infrastruktur yang memiliki multiplier effect terhadap ekonomi. ●

Untuk anggaran infrastruktur, pemerintah baru akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk menarik investasi di sektor infrastruktur

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan

#RKP(RencanaKegiatanPemerintahan)

#SaranaPrasasana

#PertumbuhanEkonomiNasional